

## PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KEMISKINAN DAN KONVERGENSI/ DIVERGENSI WILAYAH

**Indra Andrianto<sup>1</sup>, Doddy Aditya Iskandar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>1</sup>andriantoindra11@gmail.com, <sup>2</sup>doddy@ugm.ac.id

*Diterima: Juni 2019; Disetujui: November 2019*

**Abstract.** *A integrated and sustainable development is oriented towards improving people's welfare. However, disparity and poverty are still issues of development. Infrastructure and a sustainable inclusive economy are the priorities of national policies to reduce regional and socio-economic disparities by increasing connectivity between regions. The purpose of the study is to identify the conditions that are necessary and sufficient in regional development through government spending and infrastructure and economic programs on poverty as an indicator of regional disparity. This study uses a qualitative and quantitative "mix method" approach with the "Qualitative Comparative Analysis" method using case data from 20 sub-districts in Banjarnegara Regency in 2013-2017. Poor families as "outcome" variables with village fund allocation, budget and infrastructure programs, economic programs, and accessibility as casual variables. The results showed that most of the high poverty was in the northern region of Serayu River, while the southern region had higher accessibility. Within the district, based on the value of the consistency and coverage of the combination of variables, the infrastructure budget and economic program are necessary conditions and sufficient in the result of the reduction in the number of poor families. Other variables need but do not have an effect on reducing poverty. The conditions that need to be in place for the reduction of poor families in the southern region are the budget and infrastructure programs, while the northern region is the allocation of village funds and economic programs.*

**Keywords:** *disparity, poverty, regional development*

**Abstraksi.** *Pembangunan secara terpadu dan berkesinambunga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sampai saat ini, disparitas dan kemiskinan masih menjadi permasalahan pembangunan. Infrastruktur dan ekonomi inklusif yang berkelanjutan menjadi prioritas kebijakan nasional untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta sosial ekonomi dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kondisi yang diperlukan dan mencukupi pada pembangunan daerah melalui belanja pemerintah dan program infrastruktur serta ekonomi terhadap kemiskinan sebagai indikator disparitas wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan "mix method" kualitatif dan kuantitatif dengan metode "Qualitative Comparative Analysis" menggunakan data kasus 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2017. Keluarga miskin sebagai variabel "outcome" dengan alokasi dana desa, anggaran dan program infrastruktur, program ekonomi serta aksesibilitas sebagai variabel kasual. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar kemiskinan tinggi berada pada wilayah utara Sungai Serayu, sedangkan wilayah selatan mempunyai aksesibilitas lebih tinggi. Dalam lingkup kabupaten, berdasarkan nilai konsistensi dan cakupan kombinasi variabel, anggaran infrastruktur dan program ekonomi merupakan kondisi yang perlu dan mencukupi pada hasil penurunan jumlah keluarga miskin. Variabel yang lain perlu namun tidak memberikan pengaruh pada penurunan kemiskinan. Kondisi yang perlu ada untuk penurunan keluarga miskin di wilayah selatan*

*adalah anggaran dan program infrastruktur, sedangkan wilayah utara adalah alokasi dana desa dan program ekonomi.*

***Kata kunci:*** *disparitas, kemiskinan, pembangunan daerah*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berazaskan keadilan sosial dan dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses multidimensial meliputi perubahan struktur sosial, sikap hidup masyarakat dan kelembagaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan (Korua, dkk, 2016). Namun dalam pelaksanaannya, pemerataan hasil pembangunan masih sulit dilakukan. Dikotomi kota dan desa masih sering muncul dalam pembangunan daerah dan masyarakatnya. Masyarakat perdesaan bersaing secara tidak sehat dan tidak adil dengan masyarakat perkotaan sebagai akibat aksesibilitas dan sumberdaya yang terbatas dan tidak seimbang seperti infrastruktur, sumber pembiayaan dan kompetensi sumberdaya manusia (Najiyati, dkk, 2015).

Ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia berdasarkan penelitian atau publikasi terdahulu, menurut Agusta (2014) dapat dirumuskan menjadi sembilan isu strategis, yaitu : (1) pertumbuhan ekonomi; (2) kepadatan penduduk Jawa dan luar Jawa; (3) wilayah barat dan timur; (4) kabupaten/ kota dan provinsi; (5) perkotaan dan perdesaan; (6) pusat industri dan kemiskinan; (7) pendidikan; (8) kesehatan, dan (9) sosial budaya. Ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah antara lain dipengaruhi adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah yang memberikan implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat

antar wilayah. Beberapa faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi menurut Sjafrizal (2008), yaitu:

- 1) Perbedaan kandungan sumber daya alam;
- 2) Perbedaan kondisi demografis;
- 3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa ;
- 4) Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; dan
- 5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Pembangunan wilayah yang di dalamnya terdapat aspek penting pengurangan ketimpangan wilayah membutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat dari pemerintah. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama Pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Menurut Sukwika (2018) faktor yang mendorong ketimpangan salah satunya adalah perbedaan pembangunan infrastruktur antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi menuntut ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk mendorong peningkatan produktifitas dan investasi. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara pembangunan infrastruktur dengan ekonomi.

Pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah membuka keterisolasian dan menggerakkan perekonomian dengan transportasi dan lancarnya transaksi perdagangan ke daerah lain (Prahara, 2010). Dengan aksesibilitas yang baik, maka kesempatan berkembang bagi wilayah

tertinggal menjadi lebih besar. Harmes (2018) menyatakan bahwa pada wilayah dengan aksesibilitas tinggi, maka kemiskinan cenderung rendah. Wilayah dengan akses tinggi ditunjukkan dengan banyaknya jaringan jalan di wilayah tersebut sehingga dapat menurunkan biaya ekonomi masyarakat ketika melakukan aktifitas. Kegiatan infrastruktur tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja, namun keberadaannya mempengaruhi efisiensi dan kelancaran ekonomi di sektor-sektor lainnya (Wahyuni, 2011).

Pembangunan infrastruktur salah satunya bersumber pada pemerintah sebagai belanja daerah melalui kebijakan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dan ekonomi wilayah. Pembelanjaan ini mempunyai peranan yang penting khususnya untuk daerah yang sedang berkembang karena investasi swasta masih sangat terbatas (Mustaqimah, 2017). Investasi infrastruktur publik akan menghasilkan output ekonomi yang lebih besar, kerja lebih tinggi, dan kualitas hidup yang lebih baik (Chotia, 2015). Pembangunan infrastruktur memperbesar akses masyarakat miskin terhadap peluang produktif, sehingga dapat meningkatkan nilai asetnya. Jika infrastruktur mampu meningkatkan tingkat pendapatan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, maka pembangunan infrastruktur bisa menjadi alat yang ampuh untuk pengurangan kemiskinan (Chotia dan Rao, 2016). Oleh karena itu pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kebijakan di banyak negara.

Pembangunan infrastruktur juga bergantung pada alokasi sumber daya yang biasanya tidak merata di seluruh kota. Beberapa kota mengambil sebagian besar alokasi sumber daya, sedangkan kota-kota sekunder yang lebih banyak jumlahnya

hanya difasilitasi dengan jumlah yang lebih sedikit untuk pembangunan dan pemeliharaan (Rana, 2017). Kecenderungan ini menunjukkan terjadinya bias pembangunan oleh pemerintah yang memprioritaskan kota atau wilayah cepat berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan alokasi anggaran dan program akhirnya mengarah pada terkonsentrasinya pembangunan infrastruktur perkotaan atau di pusat wilayah.

Pembangunan wilayah selain penyediaan infrastruktur juga diperlukan adanya pengembangan ekonomi sebagai basis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep pengembangan ekonomi lokal merupakan perencanaan yang memadukan pendekatan pembangunan sektoral dan regional. Pengembangan tipe ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada meningkatnya perekonomian, sehingga mampu bersaing dengan wilayah di sekitarnya untuk mengurangi adanya disparitas wilayah (Prasetyaningsih, 2015).

Kabupaten Banjarnegara sebelum tahun 2010 merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang relatif masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang paling rendah di wilayah se-eks Karisidenan Banyumas. Angka kemiskinan daerah di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Ketimpangan wilayah menjadi salah satu tantangan pembangunan daerah di kabupaten ini. Ardila (2012) mengidentifikasi bahwa dari 20 kecamatan di Banjarnegara, terdapat enam kecamatan yang dapat dikategorikan sebagai pusat

pertumbuhan, sedangkan kecamatan lainnya relatif tertinggal.

Penurunan angka kemiskinan sebagai indikator pencapaian hasil pembangunan belum menggambarkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Poverty Severity Index* (P2) Banjarnegara antara tahun 2013 sampai 2017 mengalami kenaikan dari 2,91 menjadi 3,25 untuk P1 dan 0,77 menjadi 0,84 untuk P2 (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin jauh kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Alokasi dana serta program pembangunan strategis daerah yang telah dilakukan di Banjarnegara perlu dilihat apakah membawa dampak bagi pemerataan wilayah tersebut. Proposisi dalam penelitian ini adalah penurunan kemiskinan wilayah dapat dilakukan dengan pembangunan daerah dalam bentuk belanja pemerintah dan program pembangunan infrastruktur serta ekonomi yang didukung aksesibilitas yang baik. Pemerataan pembangunan dan penurunan kemiskinan diharapkan dapat mengurangi disparitas antar wilayah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan metode campuran (*mix method*) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis dilakukan dengan *Qualitative Comparative Analysis* (QCA) yang merupakan teknik analitik menggunakan aljabar Boolean yang menerapkan prinsip perbandingan dalam studi fenomena sosial makro. Fenomena yang dilihat dalam penelitian ini adalah

hubungan dan perbandingan antara kondisi kasual tingkat kemiskinan wilayah dengan investasi/ belanja daerah serta program pembangunan strategis.

Teknik QCA mengeksplorasi kehadiran implikasi logis atau mengatur hubungan dalam hal kebutuhan dan kecukupan. Kata *Comparative* berarti lebih dari satu kasus (Wagemann, 2014). Thomann dan Magnetti (2017) menjelaskan secara deterministik kondisi X (variabel kasual) diperlukan untuk hasil Y (variabel *outcome*). Analisis komparatif kualitatif secara statistik adalah teknik analisis data untuk menentukan kesimpulan logis mana yang didukung set data.

Analisis dilakukan dengan mendaftar dan menghitung semua kombinasi variabel yang diamati dalam kumpulan data, diikuti dengan menerapkan aturan inferensi logis untuk menentukan kesimpulan deskriptif atau implikasi yang didukung data (Marx & Rihoux, 2014). QCA dapat melengkapi kualitatif, kuantitatif, atau penelitian campuran-metode tradisional dan evaluasi, terutama ketika ukuran sampel kecil untuk jarak menengah antara 10-50 kasus (Devers, dkk, 2013). Hasil QCA dapat digunakan untuk menginformasikan tradisional analisis kuantitatif dengan mengidentifikasi faktor kunci untuk menyertakan atau mengecualikan dari model statistik. QCA juga memiliki kegunaan yang berbeda, baik deskriptif dan *explanatory*, yang meliputi meringkas data, membuat tipologi, memeriksa koherensi hubungan bagian, mengevaluasi hipotesis (Thomann & Magnetti, 2017). QCA digunakan untuk mempelajari situasi di mana peneliti memiliki alasan kuat bahwa suatu hasil dapat dicapai melalui beberapa kondisi yang berbeda dan hasil akan lebih kuat jika suatu kondisi dikombinasikan dengan kondisi lainnya (Devers, dkk, 2013).

Langkah awal sebelum melakukan analisis QCA adalah menyiapkan data sesuai kondisi dan karakteristik berdasarkan variabel yang telah dipilih yang kemudian dimasukkan data tabel sebagai data dasar melakukan analisis. Data variabel yang digunakan bersumber pada BPS dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2017. Penelitian ini mengambil perubahan jumlah keluarga miskin kecamatan sebagai

indikator disparitas wilayah untuk variabel *outcome* atau hasil. Variabel kasual atau kondisi adalah Alokasi Dana Desa dan Anggaran Infrastruktur (belanja pemerintah), Program Infrastruktur dan Program Ekonomi (program strategis daerah) dan Aksesibilitas (karakteristik wilayah). Set data QCA ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1.  
Set Data Analisis QCA

Unit Analisis	Belanja Pemerintah		Program Strategis		Karakteristik Wilayah	Outcome
	Alokasi Dana Desa	Anggaran Infrastruktur	Infrastruktur	Ekonomi	Aksesibilitas	Keluarga Miskin
Kecamatan (N=20)	Rp. /km <sup>2</sup>	Rp. /km <sup>2</sup>	Ada/ Tidak	Ada/Tidak	Jalur Nasional/ Regional/ Lokal	Naik/ Turun

Sumber: berbagai sumber, diolah

Data Alokasi Desa yang dimasukkan dalam set analisis adalah besarnya anggaran per kecamatan dibagi luas kecamatan. Anggaran Infrastruktur meliputi program pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, air minum/ bersih dan sanitasi/ air limbah. Program strategis bidang infrastruktur meliputi pembangunan jalan tembus, jalan lingkar, jalan strategis, jembatan, jaringan air bersih dan sanitasi. Program bidang ekonomi meliputi pengembangan wisata, desa wisata, inovasi dan peningkatan teknologi pertanian, industri rumah tangga dan UMKM, dan pengembangan kawasan strategis yang dialokasikan di wilayah kecamatan.

Langkah QCA selanjutnya adalah memutuskan unit analisis menggunakan unit analisis kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Setelah unit studi analisis ditetapkan, langkah berikutnya adalah

memilih kasus yang akan dimasukkan dalam analisis. Pertimbangan utama dalam pemilihan kasus untuk QCA adalah adanya keberagaman hasil atau *outcome*. Perbedaan hasil ini membantu membatasi jumlah kombinasi kondisi, beberapa kasus harus memiliki hasil negatif dan kasus dengan hasil positif.

Rasio kondisi untuk kasus harus diminimalkan, jumlah kombinasi dari kondisi meningkat secara eksponensial sebagai kondisi yang disertakan dalam analisis. Jika jumlah kondisi dimasukkan dalam analisis sama dengan “k”, maka jumlah logis kombinasi dari kondisi dalam analisis sama “2<sup>k</sup>”. Akibatnya, jumlah teoritis kombinasi yang mungkin dapat melampaui jumlah kasus empiris dalam analisis. Hal ini menyebabkan masalah yang dikenal sebagai keragaman terbatas.

Untuk menghindari masalah ini, peneliti memprioritaskan dan membatasi jumlah kondisi yang dimasukkan dalam analisis. Sebuah analisis yang meliputi 50 kasus seharusnya tidak lebih dari 7 kondisi (Devers, *dkk*, 2013).

Data yang sudah dikompilasi dikalibrasi sehingga dapat dikonversi ke format yang sesuai dengan analisis QCA. Proses kalibrasi menghubungkan pengukuran variasi bermakna menjadi *crisp set* dan/ atau *fuzzy set*. Kalibrasi data *crisp set* menetapkan nilai skor keanggotaan “1” dan “0” yang dalam penelitian ini dilakukan pada kondisi atau variabel program pembangunan dan karakteristik wilayah. Kalibrasi data *fuzzy set* digunakan untuk membangun nilai bervariasi yang tidak

mudah dibagi menjadi skor keanggotaan set dikotomis.

Kalibrasi keanggotaan *fuzzy set*, dengan nilai mulai dari non-anggota (0) ke keanggotaan penuh (1) dan ambang kualitatif (di antara 0 – 1). Peneliti dapat menggunakan skala interval untuk mengkalibrasi keanggotaan data. Kalibrasi *fuzzy set* dalam penelitian ini untuk data kondisi (ADD dan Anggaran Infrastruktur) serta hasil (perubahan naik dan turunnya jumlah keluarga miskin) menggunakan teknik skala internal melalui penentuan jumlah kelas berdasarkan rumus  $1 + 3,3(\log N)$ . N atau jumlah kasus pada penelitian ini adalah 20, sehingga jumlah kelas yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.  
Kalibrasi Data (Pengaturan Nilai Keanggotaan)

Belanja Pemerintah		Program Strategis		Karakteristik Wilayah	Outcome
Alokasi Dana Desa (ADD)	Anggaran Infrastruktur	Infrastruktur	Ekonomi	Aksesibilitas	Keluarga Miskin
Kelas 1 → 1	Kelas 1 → 1	Ada → 1	Ada → 1	Jalur Nas/ Jalur Reg → 1	Kelas 1 → 1
Kelas 2 → 0,8	Kelas 2 → 0,8				Kelas 2 → 0,8
Kelas 3 → 0,6	Kelas 3 → 0,6	Tidak ada →	Tidak ada → 0		Kelas 3 → 0,6
Kelas 4 → 0,4	Kelas 4 → 0,4			Lokal → 0	Kelas 4 → 0,4
Kelas 5 → 0,2	Kelas 5 → 0,2				Kelas 5 → 0,2
Kelas 6 → 0	Kelas 6 → 0				Kelas 6 → 0

Sumber: analisis data

$$\begin{aligned} \text{Jumlah kelas} &= 1 + 3,3(\log 20) \\ &= 1 + 3,3(1,30) \\ &= 5,29 \end{aligned}$$

Dengan nilai 5,29 berarti terdapat 6 kelas interval yang kemudian diskemakan seperti pada Tabel 2.

Langkah selanjutnya setelah tersusun tabel dengan nilai variabel (kondisi dan hasil) sudah dikalibrasi adalah melakukan proses analisis. Penelitian ini menggunakan alat bantu software fsQCA yang dapat

diunduh dari <http://www.compass.org/software.htm>.

Proses analisis QCA penelitian ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu; *Necessary Conditions*, dan *Subset/ Superset Analysis*. Analisis dilakukan untuk melihat kondisi yang diperlukan dan tingkat signifikan dari kondisi atau kombinasi antar kondisi pada hasil yang sama. Temuan QCA mengidentifikasi kondisi yang diperlukan (*necessary*) untuk menghasilkan *outcome* dinilai dengan seberapa konsisten

(*consistency*) kondisi muncul dalam data, dan sejauh mana cakupan (*coverage*) data tersebut. Konsistensi diukur untuk setiap kombinasi yang terpisah dari nilai-nilai yang menghasilkan *outcome* yang menarik. Hanya kombinasi dengan nilai konsistensi tinggi yang harus ditafsirkan, ambang konsistensi yang direkomendasikan setidaknya di atas 0,75 (Schneider & Wagemann, 2012).

Langkah terakhir QCA adalah menafsirkan hasil temuan dalam format narasi dengan mengidentifikasi kombinasi kondisi yang perlu (*necessary*) dan mencukupi (*sufficient*) yang ditunjukkan dengan nilai konsistensi tinggi dengan nilai cakupan (*coverage*) terbesar. Kondisi tunggal dalam pembahasan QCA bertentangan dengan tujuan pendekatan, tetapi dapat dilakukan jika sesuai.

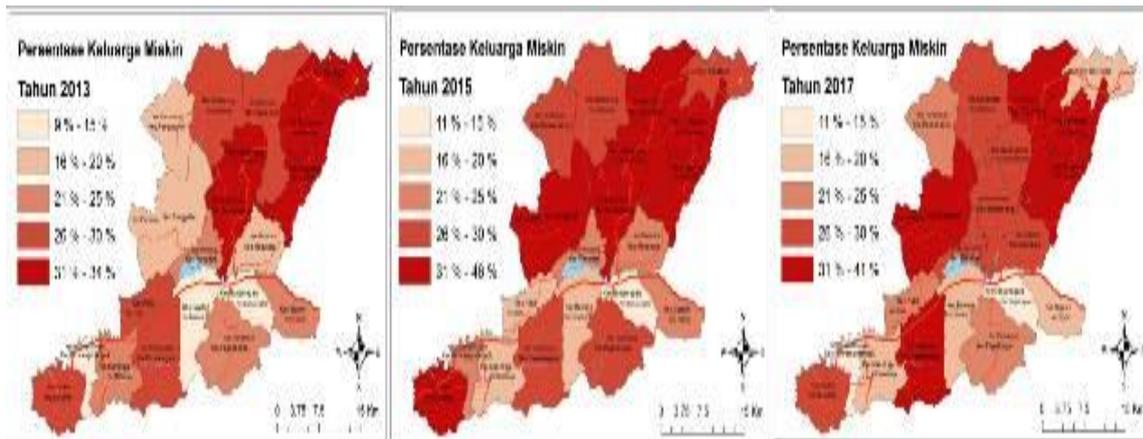
Metode triangulasi dilakukan untuk memvalidasi hasil dan temuan analisis QCA. Triangulasi merupakan metode yang dilakukan dalam penelitian terutama pada penelitian kualitatif untuk memeriksa data dan menetapkan validitas dengan analisa dari berbagai perspektif. Menurut Nasution (2003) triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Temuan analisis QCA diverifikasi dengan data dan informasi yang ada di lapangan hasil dari wawancara dan observasi (data primer), dokumen dan *content analysis*

(data sekunder) maupun kombinasi diantaranya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kemiskinan Antarwilayah

Kemiskinan antarwilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2017 dilihat dari persentase keluarga miskin sangat bervariasi. Tahun 2013, persentase keluarga miskin terendah di Kecamatan Purwareja Klampok sebesar 8,77% sedangkan yang tertinggi di Kecamatan Pagentan sebesar 33,88% atau selisih 25,11%. Persentase keluarga miskin ini meningkat pada Tahun 2017 dengan persentase terendah di Kecamatan Banjarnegara sebesar 10,76% dan tertinggi di Kecamatan Wanayasa sebesar 41,54% atau selisih 30,78%. Disparitas kemiskinan antar wilayah tertinggi terjadi pada tahun 2015 dimana terdapat selisih 34,84% dengan persentase terendah di Kecamatan Banjarnegara sebesar 10,86% dan tertinggi di Kecamatan Wanayasa sebesar 45,70%. Secara umum kemiskinan tinggi terjadi di wilayah Sisi Utara Sungai Serayu, sedangkan wilayah Selatan tingkat kemiskinan lebih rendah. Karakteristik wilayah bagian selatan lebih bersifat perkotaan didukung dengan jalur jalan nasional, sedangkan bagian utara lebih bersifat perdesaan dengan bentang alam pegunungan. Peta kemiskinan wilayah Kabupaten Banjarnegara ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Kemiskinan Wilayah Kabupaten Banjarnegara  
 Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara, diolah

**Analisis Perbandingan QCA**

Analisis QCA dilakukan dalam 3 set data; yaitu set 1 untuk data Tahun 2013 dengan hasil Tahun 2015, set 2 data Tahun 2014 dengan hasil Tahun 2016, dan set 3 data Tahun 2015 dengan hasil Tahun 2017. Penetapan data analisis berdasarkan bahwa

kebijakan dan program pemerintah tidak langsung dirasakan dampaknya namun membutuhkan waktu (*time lag*). Dalam hal ini, peneliti mengambil tahun ke-3 sebagai hasil dari kondisi pada tahun ke-1. Hasil analisis ditampilkan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3.  
 Hasil *Analysis of Necessary Conditions*

	QCA 1		QCA 2		QCA 3	
	<i>Consistency</i>	<i>Coverage</i>	<i>Consistency</i>	<i>Coverage</i>	<i>Consistency</i>	<i>Coverage</i>
ADD	0,723404	0,680000	0,616667	0,740000	0,621622	0,867924
Anggaran Infrastruktur	0,319149	0,714286	0,183333	0,785714	0,189189	0,875000
Program Infrastruktur	0,297872	0,466667	0,716667	0,537500	0,756757	0,746667
Program Ekonomi	0,297872	0,466667	0,316667	0,633333	0,675676	0,833333
Aksesibilitas	0,531915	0,500000	0,500000	0,600000	0,567568	0,763636

Sumber: analisis data

Tabel 3 menunjukkan hasil QCA *analysis of necessary conditions* yang dilakukan dengan software fsQCA untuk melihat konsistensi serta nilai cakupan kondisi dan hasil. Pada QCA 1, variabel ADD mempunyai nilai konsistensi paling tinggi, sedangkan pada QCA 2 dan QCA 3 Program infrastruktur mempunyai nilai

konsistensi tertinggi. Anggaran Infrastruktur walaupun mempunyai nilai konsistensi paling rendah namun memiliki cakupan terbesar dalam ketiga set QCA.

Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel ADD dan Program infrastruktur merupakan kondisi penting yang diperlukan untuk hasil penurunan jumlah keluarga miskin di

wilayah kecamatan. Anggaran infrastruktur namun memiliki cakupan yang besar dalam walaupun mempunyai konsistensi rendah tingkat kemiskinan wilayah.

Tabel 4.  
*Subset/ Superset Analysis*

<i>Set</i>		<i>consistency</i>	<i>coverage</i>	<i>combined</i>
QCA 1	ADD*AINFRA*ProgInf*ProgEko*Akses	1	0,042553	0,20525
	AINFRA*ProgInf*ProgEko*Akses	1	0,042553	0,20525
	ADD*AINFRA*ProgInf*ProgEko	1	0,042553	0,20525
QCA 2	ADD*AINFRA	0,875	0,116667	0,329393
	ADD*AINFRA*ProgInfra	0,833333	0,083333	0,269258
	ADD*AINFRA*Akses	0,833333	0,083333	0,269258
QCA 3	AINFRA*Proginfra*ProgEko*Akses	1	0,108108	0,32715
	AINFRA*Proginfra*ProgEko	1	0,108108	0,32715
	AINFRA*ProgEko*Akses	1	0,108108	0,32715

Sumber: analisis data

Tabel 4 menunjukkan hasil *Subset/ Superset Analysis*. Pada QCA 1, ketiga kombinasi mempunyai nilai sama.

Identifikasi kondisi yang diperlukan (*necessary*) dan mencukupi (*sufficient*) berdasarkan kondisi ada dalam ketiga kombinasi, yaitu anggaran infrastruktur, program infrastruktur dan program ekonomi. Kombinasi variabel pada QCA 2 tidak ada yang menghasilkan nilai konsistensi 1. Kombinasi variabel pada QCA 3 dengan nilai tertinggi juga menunjukkan hasil yang sama. Berdasarkan kondisi yang selalu ada dalam ketiga kombinasi, maka anggaran infrastruktur dan program ekonomi merupakan kondisi *necessary* dan *sufficient* pada wilayah kecamatan dengan penurunan jumlah keluarga miskin.

Berdasarkan ketiga set data QCA dengan periode waktu yang berbeda, kondisi yang selalu muncul pada kombinasi variabel dengan nilai konsistensi 1 adalah anggaran infrastruktur dan program ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran infrastruktur dan program ekonomi menjadi

kondisi yang diperlukan dan harus ada untuk mencapai penurunan jumlah keluarga miskin di tingkat kecamatan.

### **Temuan Analisis dan Fenomena Lapangan**

Temuan analisis QCA dikuatkan dengan metode triangulasi melalui wawancara narasumber, observasi dan informasi dari sumber yang relevan. Kemiskinan dengan indikator presentase keluarga miskin Kabupaten Banjarnegara cenderung lebih tinggi di wilayah bagian utara dibandingkan dengan wilayah selatan. Perekonomian yang cenderung stagnan pada wilayah perdesaan dan urbanisasi juga menjadi faktor kemiskinan yang masih tinggi. Wilayah bagian utara juga merupakan kawasan rawan bencana sehingga perkembangan wilayahnya juga terbatas.

Fenomena disparitas wilayah utara-selatan secara spasial dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 melalui rencana struktur ruang dengan penetapan Pusat Kegiatan Lokal Promisi

(PKLp) di Karangobar sebagai pusat pertumbuhan wilayah bagian utara. Dalam perencanaan kawasan strategis khususnya dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, wilayah utara ditetapkan Kawasan Agropolitan JAKABAYA meliputi Kecamatan Pejawaran, Karangobar, Batur dan Wanayasa sedangkan wilayah selatan dengan Kawasan Minapolitan RAJAPURBAWA meliputi Kecamatan Rakit, Mandiraja, Purwanegara dan Bawang. Implementasi program untuk mendukung perkembangan kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan tidak berjalan seimbang, dengan kondisi saat ini kawasan minapolitan lebih berkembang dibandingkan dengan kawasan agropolitan.

Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan disparitas wilayah diwujudkan antara lain dengan anggaran dan program pembangunan. Percepatan pembangunan perdesaan dilakukan dengan memanfaatkan ADD. Penentuan ADD mempertimpangkan aspek pemerataan, kemiskinan, luas wilayah dan letak geografis wilayah. Program infrastruktur strategis untuk percepatan pengembangan wilayah dilakukan dengan membangun jalan tembus dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah (jembatan Parakancangah-Kenteng dan Pucang-Jenggawur) maupun dengan kabupaten tetangga (jalan tembus Dieng-Batang dan Pagedongan-Kebumen). Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menarik investasi, sebagai contoh tempat wisata pemandian air panas D'Qiano di Kecamatan Batur yang dibangun setelah jalan tembus Dieng-Batang mulai dikerjakan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan ekonomi lokal dilakukan antara lain dengan

pengembangan desa wisata dan penyelenggaraan event/ festival kesenian dan budaya (*Dieng Culture Festival*, Festival Serayu, Nyadran Gedhe). Kegiatan ini memberi peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui jasa akomodasi, kesenian dan kerajinan. Inovasi teknologi pertanian dan perikanan menjadi landasan pengembangan industri rumah tangga, usaha kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal. Program pembangunan di wilayah kecamatan baik bidang infrastruktur dan ekonomi memberi pengaruh pada penurunan kemiskinan wilayah.

Pendekatan QCA lanjutan dilakukan untuk melihat perbedaan kondisi yang diperlukan dengan adanya fenomena disparitas wilayah selatan dan utara di Kabupaten Banjarnegara. Analisis QCA dilakukan dengan data yang sama pada wilayah selatan dengan 8 kecamatan, meliputi Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, Pagedongan dan Sigaluh. Wilayah utara meliputi 12 kecamatan, yaitu: Punggelan, Rakit, Wanadadi, Banjarmangu, Madukara, Pagentan, Karangobar, Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening dan Pandanarum.

Pada wilayah selatan, hasil QCA (*subset/superset analysis*) menunjukkan bahwa variabel anggaran infrastruktur dan program infrastruktur merupakan kondisi yang diperlukan (*necessary*) dan cukup (*sufficient*) untuk mencapai hasil penurunan jumlah keluarga miskin tingkat kecamatan. Hasil QCA wilayah utara menunjukkan kombinasi ADD dan program ekonomi sebagai kondisi yang diperlukan (*necessary*) dan cukup (*sufficient*) untuk menurunkan jumlah keluarga miskin.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa beberapa kondisi atau kombinasi kondisi

dari belanja pemerintah serta program infrastruktur dan ekonomi diperlukan untuk mendapatkan hasil penurunan kemiskinan wilayah. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya tentang belanja pemerintah (Korua, dkk, 2016; Mustaqimah, 2017), investasi dan pembangunan infrastruktur publik (Chotia, 2015; Chotia dan Rao, 2016) dan aksesibilitas (Harmes, 2018).

Penelitian disparitas wilayah (Pratiwi, 2011; Ardila, 2012; Masfufah, 2013; Adraie, 2014), kesenjangan dan kemiskinan (Sugiyarto, dkk, 2015; Marinho, dkk, 2017) serta kesenjangan infrastruktur (Sukwika, 2018) menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas, klasifikasi wilayah serta korelasi antara variabel *dependent* dengan variabel *independent*. Penelitian ini lebih menekankan pada variabel kasual sebagai kondisi yang diperlukan (*necessary*) dan mencukupi (*sufficient*) serta harus ada untuk hasil pada variabel *outcome* yang lebih baik dari hasil beberapa kombinasi variabel yang muncul. Penelitian kemiskinan dan disparitas wilayah dengan pendekatan *Qualitative Comparative Analysis* dapat menambah dan memperluas keilmuan tidak hanya pada korelasi antar variabel, namun juga perbandingan kombinasi antar variabel.

## SIMPULAN

Kemiskinan menjadi salah satu indikator adanya disparitas wilayah yang dipengaruhi oleh banyak faktor sesuai dengan sifat dan konsep kemiskinan yang multidimensi. Intervensi pemerintah dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat disparitas dan kemiskinan wilayah.

Anggaran infrastruktur dan program ekonomi menjadi kondisi yang perlu ada (*necessary*) dan cukup (*sufficient*) untuk mendapatkan outcome penurunan jumlah keluarga miskin kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Alokasi dana desa, program infrastruktur dan aksesibilitas menjadi kondisi yang perlu namun tidak berpengaruh pada turunnya jumlah keluarga miskin.

Pada wilayah selatan dengan presentase kemiskinan lebih rendah dan aksesibilitas lebih baik, anggaran dan program infrastruktur menjadi kondisi yang perlu dan harus ada untuk hasil penurunan keluarga miskin. Wilayah utara dengan presentase kemiskinan lebih tinggi di sebagian besar kecamatan dan aksesibilitas lebih rendah, alokasi ADD yang lebih besar dan program ekonomi menjadi kondisi yang perlu ada untuk penurunan kemiskinan wilayah. Beberapa kombinasi antar variabel menghasilkan hasil yang sama (penurunan jumlah keluarga miskin) namun mempunyai cakupan atau besaran hasil yang berbeda.

Intervensi Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan mempunyai peran penting sebagai salah satu faktor untuk mengurangi kemiskinan dan disparitas wilayah. Sektor non publik perlu dilibatkan untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Kajian perkembangan wilayah diperlukan sebagai dasar merumuskan *roadmaps* kebijakan dan prioritas program dengan pertimbangan aspek spasial kewilayahan agar tidak bias atau terkonsentrasi pada pusat kegiatan atau wilayah tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adraie, Achmad Chozin. (2014). *Disparitas Wilayah Kabupaten Sampang*. Yogyakarta: Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada
- Agusta, Ivanovich. (2014). *Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ardila, Refika. (2012). Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>. Diakses, 16 Mei 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. (2018). *Kabupaten Banjarnegara Dakam Angka Tahun 2017*. Banjarnegara : BPS
- Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara. (2018). *Rencana Strategis Daerah Kabupaten Banjarnegara*. Banjarnegara: Baperlitbang
- Chotia, Varun. (2015). Examining the interlinkages between regional infrastructure disparities, economic growth, and poverty: A case of Indian States . *Journal: Economis Annals Volume: 60 Issue: 205 Page: 53-71*
- Chotia, V., & Rao, N. (2016). *Investigating the interlinkages between infrastructure development, poverty and rural-urban income inequality*. *Studies in Economics and Finance*. 34(4). 466-484.
- Devers, Kelly J., Lallemand, Nicole C., Burton, Rachel A., Kahwati, Leila., McCall, Nancy & Zuckerman, Stephen. 2013. *Using Qualitative Comparative Analysis (QCA) to Study Patient-Centered Medical Homes: An Introductory Guide*. California: Urban Institute
- Harmes. (2018). *Model Pembangunan Wilayah Berbasis Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu*. Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Korua, Fernando S., Rumat, Vekie A., & Siwu, Hanly F.Dj. (2016). Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Tenaga Kerja Sebagai Intervening Variabel Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 1 2016*. 410-417
- Marinho, E., Campelo, G., Franca, Joao & Araujo, Jair. (2017). Impact of Infrastructure Expenses in Strategic Sectors for Brazilian Poverty. *Economia 18 (2017) : 244-259*. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/>, diakses pada 20 Maret 2019
- Marx, A. & Rihoux, B. (2014). The Origins, Development, and Application of Qualitative Comparative Analysis: The First 25 Years. *European Political Science Review*. 6(1). 115-142.
- Masfufah. (2013). Konvergensi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Wilayah Kabupaten/ Kota di Indonesia. *Sosiohumaniora Vo. 15 No. 2, Juli 2013*. 194-202
- Mustaqimah, Khodijah. (2017). *Peran Belanja Modal Pemerintah Dan Investasi Pembangunan Manusia Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

- Najiyati, S., Simanjuntak, Robert A., & Nurwati, Nunung. (2015). Sinergisme Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kawasan Perdesaan Telang Dan Batu Betumpang. *Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 19, No. 3, Desember 2015*. 218-245
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Prahara, Guntur. (2010). *Analisis Disparitas Antar Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Prasetyaningsih, Eka Dyah Wahyu. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Salakdi Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 4*. 514-529
- Pratiwi, Nana Novita. (2011). *Disparitas Wilayah Antar Kecamatan di Kabupaten Malang*. Yogyakarta : Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada
- Rana, Irfan Ahmad. (2017). The Spatial and Temporal Dynamics of Infrastructure Development Disparity – From Assessment To Analyses. *Journal: Cities Volume: 63*. 20-32
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media
- Schneider, Carsten Q. & Wagemann, Claudius. (2012). *Set-Theoretic Methods for The Social Sciences: A Guide to Qualitative Comparative Analysis*. Cambridge : Cambridge University Press
- Solikatun., Supomo., Masruroh, Yulia, & Zuber, Ahmad. (2014). Kemiskinan dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi, April 2014 3 (1)*. 70-90
- Sugiyarto., Mulyo, Jangkung H., & Seleky, Rosalia Natalia. (2015). Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Agro Ekonomi. Volume 26 Nomor 2*. Desember 2015. 115-120
- Sukwika, Tatan. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Volume 6 Nomor 2*. Agustus 2018. 115-130
- Thomann, Eva & Magnetti, Martino. (2017). Designing Research With Qualitative Comparative Analysis (QCA): Approaches, Challenges, and Tools. *Sociological Methods & Research*. XX(X). 1-31
- Wagemann, Claudius. (2014). Qualitative Comparative Analysis (QCA) : What It Is, What It Does, and How It Works. In Porta, Donatella Della (Eds). *Methodological Practices in Social Movement Research* (pg. 43-66). Oxford University Press
- Wahyuni, Krismanti Tri. (2011). *Konvergensi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa*. Bogor : Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.